

**PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN**
**(Studi Terpilihnya Bupati Luwu Utara Sebagai Kepala Daerah Perempuan
Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan)**

Iqbal Aidar Idrus, Umami zakiah
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : idrusiqbal@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang di adakan serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 sesuai perintah Undang-Undang No 8 Tahun 2015. Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang di ikuti oleh sebelas daerah dan tiga puluh lima (35) pasangan calon kepala daerah, yang menarik dari tulisan ini yaitu terpilihnya kepala daerah perempuan pertama dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan di pemilihan kepala daerah ini. Dari tiga puluh lima calon (35) ada empat (4) perempuan yang ikut dalam pencalonan kepala daerah tiga diantaranya sebagai calon kepala daerah dan satu sebagai wakil kepala daerah, dari Empat (4) calon tersebut muncul satu nama yang terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI periode 2016-2021 yang merupakan pendatang di daerah pemilihan tersebut dan sekaligus pernah menjadi wakil Bupati Luwu Utara. Pada pilkada serentak ini Indah Putri Indriani bertarung dengan petahana yaitu Drs. Arifin Junaidi yang pada saat itu sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 bersama Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI yang merupakan Wakil Bupati beliau. Ketokohan beliau yang merupakan sosok ibu yang mempunyai keramahan, murah senyuh, wibawa dan akrab dengan siapapun sangat di kenal dikalangan masyarakat kecil di Luwu Utara yang selalu terjun langsung ke masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati pada saat itu. Tidak heran ketika Bupati cantik ini bisa mendapatkan hati pemilih kelas bawah maupun kelas menengah, begitu dengan sosok beliau yang gaul dengan aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, WhatsApp dan media sosial lainnya, tidak heran ketika beliau mendapatkan suara yang cukup besar di pemilih pemula yang sebagai besar menggunakan media sosial, hal ini di manfaatkan oleh Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Perempuan dan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah. Alasannya, menurut Assiddiqie, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia international, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik. Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur

Ketentuan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah, namun berdasar putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya “Pemilihan Umum Nasional Serentak” atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Putusan ini menarik dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi dan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi memiliki kewenangan untuk menata sistem ketatanegaraan dan demokratisasi yang

mengarah pada idealisasi sistem pemilu di Indonesia melalui pengujian undang-undang (Prasetyoningsih Nanik, 2014)

Begitu halnya dalam pemilihan peran penting Partai politik berfungsi sebagai saluran aspirasi warga negara. Peran partai politik memperoleh momentumnya pada saat Pemilu, ketika warga negara memilih para anggotalegislatif yang akan membawa aspirasi mereka. Karena itu, partai politik memiliki tugas, yaitu menyeleksi, menawarkan, dan mencalonkan kadernya sebagai calon anggota legislatif dan calon kepala daerah untuk dipilih rakyat. Partai yang menjadi pemenang pemilu di suatu daerah, bisa dimaknai sebagai partai yang memperoleh tempat di hati masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum (Mahadi 2011). Partai Politik (Parpol) sebagai salah satu komponen bangsa sesungguhnya memiliki peran yang strategis untuk ambil bagian dalam menumbuhkan kembangkan kembali wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Hal itu sangat dimungkinkan berdasarkan UU No. 2 / Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang antara lain memuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat. Regulasi ini memberikan isyarat betapa strategisnya peran partai politik dalam memberikan pembinaan politik bagi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

Partai politik sangat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah maupun dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sedangkan penerapan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, dimaksudkan agar proses demokratisasi tetap terpelihara melalui pemilu yang lebih berkualitas, demokratis, dapat dilaksanakan dengan baik, terkelola dan terlembaga. Beberapa pengaturan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu dengan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai tingkat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas, serta menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Pendekatan elit dan pendekatan kelompok terhadap studi perbandingan politik berpusat pada agregasi aktor-aktor politik dan menekankan pada kekuatan

kekuatan dan hubungan-hubungan sosial. Kedua pendekatan itu sangat menyadarkan pada semacam konsep-konsep hubungan seperti power, pengaruh, tekanan dan otorita. Kedua pendekatan merupakan upaya-upaya secara khusus untuk menganalisa proses-proses yang bekerja di balik hiasan-hiasan formal dan lembaga-lembaga hukum pemerintah. Oleh karena itu kedua pendekatan telah membantu dalam mengurangi penekanan tradisional yang menempatkan pada pendekatan hukum formal terhadap studi proses-proses politik. Sekalipun ada kesamaan-kesamaan ini, perbedaan-perbedaan analitik yang mendasar memisahkan dua pendekatan itu, yang paling penting dari perbedaan-perbedaan ini terletak dalam perspektif dasar dari setiap pendekatan (Budi dan Winarno 2005).

Pilkada serentak di Indonesia pertama kalinya di adakan pada tahun 2015 dengan cakupan nasional, daerah yang terlibat dalam pesta demokrasi ini sebanyak 269 pemilihan kepala daerah, dimana 9 tingkat provinsi yaitu pemilihan Gubernur, 30 tingkat kota pemilihan Wali Kota dan 224 Kabupaten pemilihan Bupati tepat pada tanggal 9 Desember 2015 serentak di seluruh daerah Indonesia. Menariknya dari 269 pemilihan kepala daerah dapat mewakili 32 Provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia hanya ada dua provinsi saja yang tidak ikut dalam pesta demokrasi tersebut yaitu DKI Jakarta dan Nangroe Aceh Darussalam.

Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam salah satu Provinsi yang ikut di Pilkada serentak, ada 11 Kabupaten ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi yang baru saja di selenggarakan di Indonesia, ada beberapa hal yang menarik dalam pemilihan umum tersebut salah satunya Bupati Luwu Utara yaitu Indah Putri Indriani sebagai berhasil mengalahkan seorang petahayang mempunyai tingkat popularitas, modalitas dan figuritas yang dianggap kuat dari calon lainnya. Tapi dengan pengalaman dan strategi politik Indah Putri Indriani yang mempunyai latar belakang sebagai seorang akademisi, pernah memiliki pengalaman menjadi staf pengajar program S1 & Ekstensi FISIP UI, dosen Pascasarjana Ilmu Politik UI, dosen FISIP Universitas Bung Karno dan dosen FISIP Universitas

Muhammadiyah Jakarta dan juga memiliki seorang Suami yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR- RI akhirnya berhasil membuahkan kemenangan dan sekaligus menjadi Kepala Daerah pertama di Sulawesi Selatan.

Pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Sulawesi selatan juga di ikuti kontestan perempuan lainya seperti Hj. Jumrana Salikki, SE calon Bupati Kabupaten Bulukumba yang menggunakan jalur perorangan dengan memperoleh sebesar 16.096 suara yang gagal bersaing dengan Bupati terpilih Bulukumba yaitu H. A. M. Sukri A. Sappewali yang di dukung oleh partai politik Demokrat, NasDem, Gerindra dengan memperoleh sebesar 60.517, begitu halnya dengan Kabupaten Gowa yang di ikuti konsestan perempuan Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, SH, M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten Gowa yang tidak lain sebagai keluarga Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus sebagai kerabat Bupati terpilih Adnan Purichta Ichsan YL, SH yang merupakan keponakanya dan anak dari mantan Bupati Gowa yang merupakan saudara kandungnya, dimana Tenri Olle Yasin Limpo di dukung oleh partai politik PPP dan Nasdem dengan memperoleh sebesar 95.136 suara yang kalah jauh dengan keponakanya yang mendapatkan suara 151.234 suara dan berhasil menjadi Bupati terpilih di Kabupaten Gowa. Terlihat bahwa calon kepala daerah perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat susah bersaing dengan kaum laki-laki lainya yang sebagian besar menang pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

Pemilihan umum daerah atau yang sering disebut dengan Pemilukada adalah bentuk demokrasi yang tampil sejak pertengahan 2005 lalu. Pemilukada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif dideerah, mulai dari Walikota, Bupati, hingga Gubernur. Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam Pemilukada sudah tentu memberikan manfaat bagi daerah mereka masing-masing. Asumsi bahwa mereka yang dipilih, merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih untuk kemajuan daerahnya, menentukan 5 tahun depan untuk pembanguna daerah dan kesejahteraan rakyat merupakan waktu yang cukup lama untuk seseorang pemimpin mewujudkan visi dan missinya pada saat mereka

berkampanye di hadapan ribuan masyarakatnya. Begitu halnya dengan Patronase yang definisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapat dukungan politik dari mereka menurut (Shefter 1994 : 283 dalam Aspinal dan Sukmajati 2015).

Sehingga kemenangan tersebut dapat juga di ukur dengan teori elit yang memiliki atau tidak memiliki kekuasaan, Putnam menawarkan setidaknya ada tiga strategi untuk mengidentifikasi elit politik (elit dan kekuasaan), (Putnam dalam Haryanto 2005). Tiga strategi itu adalah analisa posisi, analisa reputasi dan analisa keputusan. Pertama, analisa posisi mempunyai suatu anggapan bahwa lembaga atau struktur pemerintah formal mempunyai suatu peta hubungan kekuasaan yang bisa dipakai untuk menganalisa siapa yang berkuasa di antara para elit, dan bahwa pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi puncak dalam lembaga – lembaga tersebut cenderung secara politis berkuasa. Kedua, analisa reputasi mendasarkan pada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki para elit. Dalam hal ini elit dapat dilihat sejauh mana partisipasinya dalam sistem politik untuk mengetahui keterlibatannya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, analisa keputusan merupakan cara untuk mengetahui siapakah di antara para elit yang berkuasa dengan mempelajari proses pembuatan keputusan-keputusan tertentu. Dalam konteks ini, sesungguhnya yang mendapat perhatian penting adalah dari pihak siapakah sebetulnya yang berhasil mengajukan inisiatif pembuatan keputusan, dan pihak siapakah yang menentang keputusan tersebut.

Sistem pemerintahan demokrasi, pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Pada tahun 2004, Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR telah dipilih langsung oleh rakyat. Begitupun dengan kepala daerah yang dulunya dipilih oleh DPRD, maka sejak tahun 2005 Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dan sekarang Pilkada serentak di Indonesia pertama kalinya di adakan pada tahun 2015 dengan cangkupan nasional, daerah yang terlibat dalam pesta demokrasi ini sebanyak 269 pemilihan kepala daerah, dimana 9 tingkat provinsi

yaitu pemilihan Gubernur, 30 tingkat kota pemilihan Wali Kota dan 224 Kabupaten pemilihan Bupati tepat pada tanggal 9 Desember 2015 serentak di seluruh daerah Indonesia..

Ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari UU otonomi daerah yang baru, UU No.32 Tahun 2004 yang di perbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Inilah pencapaian terbaik otonomi daerah, dimana masyarakat langsung dilibatkan untuk memilih pemimpin yang akan memerintah mereka selama pembatasan masa jabatan seorang kepala daerah, yaitu cukup satu periode saja, lima tahun ke depan. Kecuali bagi mereka yang benar-benar menonjol prestasi atau keberhasilannya. Berikut adalah nama-nama konsestan yang ikut dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember tahun 2015 yang di ikuti oleh 11 Kabupaten dan 35 pasangan calon Kepala Daerah yang masing-masing mempunyai kendaraan politiknya baik melalui jalur perorangan maupun partai politik.

Tabel 1

Daftar Peserta Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan

DAERAH PEMILIHAN	NO. UR UT	NAMA PASLON	L/ P	NAMA WAKIL PASLON	L/ P	PARTAI PENDUKUNG	HASIL SUARA
KAB. KEPULAUAN SELAYAR	1	H. Saiful Arif, S.H.	L	H. Muh. Junaedy Faisal, S.E.	L	NasDem, Demokrat, PDIP	22.528
	2	Muh. Basli Ali	L	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H.	L	Gerindra, PKS	32.077
	3	Aji Sumarno, S.STP., M.M.	L	Drs. Abd. Gani, M.Pd. I	L	PAN, Hanura, PKB	20.011
KAB. BULUKUMBA	1	H. A. M. Sukri A. Sappewali	L	Tomy Satria Yulianto, S.IP	L	Demokrat, NasDem, Gerindra	60.517
	2	Abdul Kahar Muslim, S.Hi	L	Andi Sabri Mustari	L	Golkar, PKS	50.385
	3	Hj. Jumrana Salikki, SE	P	H. Husbiannas Alsi, S.Sos	L	Perorangan	16.096
	4	IR. H. Masykur A. Sultan, MS	L	DRS. H. A. Edy Manaf	L	PAN, PBB, PKB	31.629
	5	H. Askar. HL, SE	L	H. Nawawi Burhan, Bsc, SE	L	PPP, Hanura, PDIP	55.235

KAB. GOWA	1	DRS. Andi Maddusila Andi Idjo	L	Wahyu Permana Kaharuddin, SE	L	Demokrat, Hanura, PKS, PKB	97.680
	2	DRS. H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung	L	IR. H. M. Anwar Usman	L	Golkar	14.096
	3	Ir. Djamaluddin Maknun, MP	L	DR. H. Masjkur, SP., M.Si	L	Perorangan	5.748
	4	Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, SH, M.Si	P	DRS. H. Hairil Muin, M.Si	L	PPP, Nasdem	95.136
	5	Adnan Purichta Ichsan YL, SH	L	H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.Si		Perorangan	151.234
KAB. MAROS	1	Ir. H. Muh. Imran Yusuf, MM	L	H. M. Said Patombongi	L	PBB, PKS, Hanura	4.229
	2	H. A. Husain Rasul, SH	L	Sudirman	L	Gerindra, Demokrat	46.945
	3	Ir. H. M. Hatta Rahman, MM	L	Drs. H. A. Harmil Mattotorang, MM	L	PAN	106.942
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	1	Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom	L	Ir. H. Kamrussamad, M.Si	L	PKB, Gerindra	75.380
	2	H. Sangkala H. Taepe	L	A. M. Ali Gaffar, SE	L	Perorangan	20.816
	3	Drs. H. Nur Achmad AS, SH	L	Drs. Hapsul W. Hafattah	L	Perorangan	1.939
	4	H. Syamsuddin A. Hamid, SE	L	H. Syahban Sammana, SH	L	Demokrat, PDIP, PKS, Hanura	82.304
KAB. BARRU	1	Drs. H. Andi Anwar Aksa	L	H.Adham Arman, S.Sos	L	PDIP, Golkar	24.548
	2	H.M. Malkan Amin	L	A. Salahudin Rum	L	Nasdem, Demokrat, PAN	37.907
	3	Ir. H. Andi Idris Syukur, MS	L	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si	L	PPP, PKS, Hanura, Gerindra	38.726
KAB. SOPENG	1	Ir.H. Lutfi Halide, MP	L	H. Andi Zulkarnain Soetomo, S.STP, M.SI	L	Demokrat, PPP, PBB, Nasdem	59.101
	2	H.A. Kaswadi Razak, SE	L	Supriansa, SH., MH	L	Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PKS	80.802
KAB. TANA TORAJA	1	Dr. Zadrak Tombeng, Sp.A	L	Dra. Ch. Jeane Tandirerung, MM	P	Nasdem, Gerindra, Hanura	30.594
	2	Ir. Nicodemus Biringkanae	L	Victor Datuan Batara, SH	L	Demokrat, PKPI	51.297
	3	Theofilus Allorerung, SE	L	Yohanis Lintin Paembongan	L	Golkar, PDIP	40.286
KAB. LUWU UTARA	1	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI	P	Muh. Tahar Rum, SH	L	Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat	90.824
	2	DRS. Arifin Junaidi	L	Andi. Abdullah Rahim, ST	L	PAN, Hanura, PKB, PKS	78.614

KAB. LUWU TIMUR	1	Drs. H.M. Nur Husain	L	Drs.Esra Lamban	L	PDIP, Demokrat	45.727
	2	Dr.H. Badaruddin A.P,ST.,MM., M.AP	L	Andi baso Makmur, SE	L	PAN, Hanura	6.575
	3	Ir. H. Muh Thoriq Husler	L	Irwan Bachri Syam, ST	L	Gerindra, Nasdem	84. 014
KAB. TORAJA UTARA	1	Dr. Kalatiku Paembona, M.Si	L	Yosia Rinto Kadang, ST	L	PDIP, Gerindra	71.120
	2	Drs.Frederik Batti Sorring, S.Sos., MM	L	Fredeerik Buntang Rombelayuk, S.Pd	L	Nasdem, Hanura, Demokrat, PKPI	60.102

Sumber : KPU Pusat

Tabel diatas menjelaskan setiap pasangan calon kepala daerah dalam mengendarai partai politik dan jalur perorangan, begitu dengan jumlah suara dari 11 daerah yang mengikuti pilkada serentak ini. Terlihat jelas dari 35 pasangan calon ada empat perempuan yang ikut dalam pencalon kepala daerah tiga diantaranya sebagai calon kepala daerah dan satu sebagai wakil kepala daerah, dari 4 calon tersebut muncul satu nama yang terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI periode 2016-2021 yang merupakan pendatang baru di daerah pemilihan tersebut dan sekaligus pernah menjadi wakil Bupati Luwu Utara . Pada pilkada serentak ini Indah Putri Indriani bertarung dengan petahana yaitu DRS. Arifin Junaidi yang pada saat itu sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 bersama Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI yang merupakan Wakil Bupati. Ada sebagian masyarakat yang belum memiliki pengertian yang tepat mengenai apa itu feminisme. Feminisme merupakan pendekatan akademis yang melihat melalui gender untuk memahami lebih jauh tidak hanya tentang perempuan dan gender tetapi juga bagaimana perempuan dan gender mampu menolong kita untuk mempelajari lebih luas tentang dunia secara umum. Feminisme tidak hanya menyangkut persoalan perempuan ataupun sekadar menambahkan perempuan ke dalam konstruksi laki-laki (*male construction*), melainkan menyangkut pandangan kita terhadap politik global dalam melihat isu gender dan perempuan dan bagaimana hal ini menunjukkan bagaimana dunia mengupayakannya. Di dalam feminisme, ada banyak aliran pemikiran yang berkembang dan mempunyai jawaban berbeda mengenai

politik dan politik internasional, perbedaan tersebut harus di lihat sebagai satu lautan dengan banyak gelombang dan bukan sebagai sungai-sungai yang mengalir ke banyak arah. (Soetjipto & Trimayuni, 2013).

Pesta demokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 ini merupakan pilkada serentak yang menyita perhatian masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Luwu Utara, apalagi dalam pemilukada ini Kabupaten Luwu Utara telah melahirkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru, yaitu pasangan Indah Putri Indriani dan Muh.Thahar Rum, yang sebelumnya tidak di unggulkan pada pilkada ini dan yang menjadi perhatian adalah Indah Putri Indriani, selain terpilih sebagai Bupati Luwu Utara pada pemilukada 2015, Indah Putri Indriani juga merupakan bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan, ini merupakan sejarah baru dalam pesta demokrasi di Provinsi ini, tidak heran perempuan yang masih tergolong relatif muda ini menjadi pusat perhatian dalam keikutsertaannya di sebuah kontestasi, Indah Putri Indriani berhasil mengungguli bupati petahana Arifin Junaidi dalam pemilukada serentak 9 desember 2015 lalu, dengan selisih suara 12.210 suara. Adapun hasil perolehan suara pada Pemilukada Luwu Utara 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara

No Urut	Nama Paslon	Partai Pendukung	Hasil Suara	Selisih Suara
1	Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI	- Gerindra - Demokrat	90.824 Suara (53,60 %)	Selisih Suara Sebesar 12.210 Suara
	Muh. Tahar Rum, SH	- Nasdem - PDIP		
2	DRS. Arifin Junaidi	- PAN	78.614	
	Andi. Abdullah Rahim, ST	- Hanura - PKB - PKS	Suara (46,40%)	

Sumber : KPU Pusat

Tabel di atas menjelaskan perbedaan perolehan suara antara dua kandidat tersebut cukup jauh dan nama-nama partai politik yang diendarai dari dua kandidat tersebut merupakan partai-partai besar yang mempunyai basis suara di Kabupaten Luwu Utara, tidak heran ketika pengaruh partai politik tidak terlalu signifikan untuk menjadikan kekuatan besar dalam kemenangan Indah Putri Indriani, yang dimana mempunyai modalitas yang cukup besar, perspektif Feminisme yang baik dan keterlibatan elit lokal dalam kemenangan pilkada sehingga ketokohan beliau pun sangat di kenal dikalangan masyarakat kecil di Luwu Utara yang selalu terjun langsung atau di katakan sering melakukan blusukan ke masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati pada saat itu, tidak heran ketika Bupati cantik ini bisa mendapatkan hati pemilih kelas bawah maupun kelas menengah dan kaum milenial, begitu dengan sosok beliau yang gaul dengan aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, WhatsApp dan media sosial lainnya, tidak heran ketika beliau mendapatkan suara yang cukup besar di pemilih pemula yang sebagai besar menggunakan media sosial, hal ini di manfaatkan oleh Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

KESIMPULAN

Dari tulisan ini dapat di simpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti pilkada serentak pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 yang di ikuti semua daerah yang ada di Indonesia. Dimana Sulawesi Selatan masuk dalam salah satu Provinsi yang ikut di Pilkada serentak, ada 11 Kabupaten ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi yang baru saja di selenggarakan di Indonesia, ada beberapa hal yang menarik dalam pemilihan umum tersebut salah satunya Bupati Luwu Utara terpilih yaitu Indah Putri Indriani yang merupakan sejarah bagi pesta demokrasi di Sulawesi Selatan karena menjadi Kepala Daerah perempuan pertama, dimana beliau berhasil mengalahkan seorang petahan yang sebelumnya sebagai Bupati Luwu Utara yang mempunyai tingkat popularitas, modalitas dan figuritas yang dianggap kuat dari calon lainnya. Kemenangan Indah Putri Indriani juga menaikkan tingkat percaya diri untuk perempuan agar ikut andil dalam dunia politik baik menjadi anggota DPRD, Bupati, Wali Kota dan Gubernur sekalipun.

Kita ketahui selama ini tingkat partisipasi perempuan dalam dunia politik di Sulawesi Selatan cukup rendah dari Provinsi lainya dengan terpilihnya Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini diharapkan muncul indah-indah lainya untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing.

SARAN

Dari tulisan ini penulis menyarankan untuk membuat artikel atau tulisan lainya yang bisa memotivasi kaum perempuan dalam dunia politik, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemilu dimana perempuan harus ikut berpartisipasi bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitu halnya di dalam keperngurusan Partai Politik dan dengan tulisan ini agar pembaca menyadari bagaiman kekuatan politik gender tidak bisa diremehkan terbukti dengan terpilihnya kepala daerah pertama di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal E dan Sukmajati M, 2015. Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014, Jogjakarta. PolGov.
- Haryanto, 1990, Elit, Massa dan konflik, Pusat Antar Universitas-Studi sosial, UGM, Yogyakarta, hal. 6
- Soetjipto & Trimayuni, 2013. Gender & Hubungan Internasioan, Yogyakarta, Jalasutra.
- Prasetyoningsih Nanik, 2014. Dampak Pemilihan Umum Serentak, Jurnal Media Hukum.
- Winarno, Budi, 2005. *Otonomi, Demokrasi, dan Pembangunan Daerah*, Jurnal.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .
- Undang – Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah
- Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)